

**PENGARUH PERAN AUDITOR INTERNAL, PRODUKTIVITAS
PEGAWAI DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SOFTWARE AKUNTANSI
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

RICKO ESTAVIA
2006/77743

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH PERAN AUDITOR INTERNAL, PRODUKTIVITAS PEGAWAI DAN
EFISIENSI PENGGUNAAN SOFTWARE AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.**

NAMA : RICKO ESTAVIA
BP/NIM : 2006/77743
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KEAHLIAN : SEKTOR PUBLIK
FAKULTAS : EKONOMI

Padang, 11 April 2012

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak

NIP. 19580519 199001 1 001

Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

NIP. 19730213 199903 1 003

Ketua Prodi

Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang**

**Judul :PENGARUH PERAN AUDITOR INTERNAL,
PRODUKTIVITAS PEGAWAI DAN EFISIENSI
PENGUNAAN SOFTWARE AKUNTANSI TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT.**

Nama : RICKO ESTAVIA

BP/NIM : 2006/77743

Program Studi : Akuntansi

Keahlian : Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, 11 April 2012

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak	1.
2. Sekretaris	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	2.
3. Anggota	: Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak	3.....
4. Anggota	: Charolin Cheisviyanny, SE, Mak	4.

ABSTRAK

Ricko Estavia, 77743/2006, Pengaruh Peran Auditor Internal, Produktivitas Pegawai dan Efisiensi Penggunaan *Software* Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2012.

**Pembimbing : I. Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak
II. Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji (1) pengaruh Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, (2) pengaruh Produktivitas Pegawai terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan (3) pengaruh Efisiensi Penggunaan *Software* Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dari penelitian ini adalah 42 SKPD yang berada dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sampel penelitian ini adalah 2 orang pegawai bagian Akuntansi per-SKPD. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari menyebarkan angket penelitian. Teknik analisis data dengan menggunakan regresi berganda

Hasil penelitian membuktikan bahwa: 1) Peran Auditor Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 2) Produktivitas Pegawai berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 3) Efisiensi Penggunaan *Software* Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam penelitian ini disarankan: 1) Bagi SKPD yang berada di lingkungan Provinsi Sumatera Barat diharapkan lebih meningkatkan pelatihan yang diberikan kepada pegawai serta menciptakan organisasi yang lebih terbuka terhadap perubahan., 2) Untuk penelitian sejenis agar dapat menggunakan atau menamakan variabel lainnya yang diduga dapat memberikan gambaran mengenai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah yang lebih baik

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Peran Auditor Internal, Produktivitas Pegawai dan Efisiensi Penggunaan *Software* Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak sebagai pembimbing I dan Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.si, Ak sebagai pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis selama ini. Selain itu, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membantu dalam kelancaran Administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi.
5. Teristimewa buat kedua orang tuaku Helman, Huslianora, dan seluruh keluarga besar penulis atas kasih sayang dan bantuan moril dan materil.
6. Teman-teman di Fakultas Ekonomi yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini, terutama teman-teman Program Studi Akuntansi Angkatan 2006.
7. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga penelitian berikutnya akan menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Padang, Februari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN	
HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	12
1. Laporan Keuangan	12
a. Pengertian Laporan Keuangan	12
b. Tujuan Laporan Keuangan	13

c. Komponen Laporan Keuangan	15
d. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan.....	15
2. Auditor Internal	20
3. Kompetensi Pegawai.....	26
4. Penggunaan <i>Software</i> Akuntansi	33
B. Penelitian Relevan	39
C. Kerangka Konseptual	40
D. Hipotesis	43
BAB III. METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Populasi Dan Sampel	44
C. Jenis data dan Sumber data.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Variabel Penelitian.....	48
F. Pengukuran Variable	49
G. Instrumen Penelitian	50
H. Uji Validitas dan Reliabilitas	53
I. Hasil Uji Coba Instrumen	55
J. Uji Asumsi Klasik	56
K. Teknik Analisis Data	58
L. Definisi Operasional	64
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	67
B. Demografi Responden	68
C. Statistik Deskriptif	71
D. Uji Valid dan Reliabilitas	72

E. Uji Asumsi Klasik	73
F. Deskriptif Variabel Penelitian	76
G. Hasil Penelitian	83
H. Pembahasan	88
BAB V. PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Keterbatasan	93
C. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar nama SKPD.....	45
2. Skala Pengukuran	50
3. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	51
4. Uji <i>Pilot-Test</i> Instrumen Penelitian.....	55
5. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	67
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	68
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	69
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Keahlian Yang telah Ditempuh	69
9. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama bekerja	70
10. Statistik Deskriptif	71
11. Nilai <i>Corrected Item Total Correlation</i> Penelitian	72
12. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Penelitian	73
13. Uji Normalitas	74
14. Uji Multikolinearitas	75
15. Uji Heterokedastisitas	76
16. Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemda.....	77
17. Distribusi Frekuensi Variabel Peran Auditor Internal	78
18. Distribusi Frekuensi Kompetensi Pegawai	79
19. Distribusi Frekuensi Penggunaan <i>Software</i> Akuntansi	81
20. Uji Koefisien Determinasi	83
21. Koefisien Regresi Berganda.....	84
22. Uji F Hitung	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
23. Kerangka Konseptual	43

DAFTAR LAMPIRAN

25. Print Out Uji Validitas dan Reabilitas	98
26. Print Out Uji Normalitas	102
27. Print Out Deskriptif Statistik.....	103
28. Print Out Pengujian Asumsi Klasik	104
29. Print Out Regresi Linear Berganda.....	105
30. Print Out Pengujian Hipotesis.....	106
31. Kuesioner Penelitian	108
32. Tabulasi Data Penelitian	112

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Menurut Salam (2004:219) bahwa pemerintahan yang baik dan bersih pada umumnya berlangsung pada masyarakat yang memiliki kontrol sosial yang efektif yang merupakan ciri dari masyarakat demokratis yang kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak bisa bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara termasuk di dalamnya melakukan penyalahgunaan wewenang dan melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan terus bergulirnya reformasi di bidang keuangan negara, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi dibidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Perubahan dibidang akuntansi pemerintahan yang paling diinginkan adalah adanya standar akuntansi pemerintah. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat

meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 32 ayat (1), menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan dari laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Pemenuhan tujuan laporan keuangan tersebut akan bermanfaat, berkualitas dan dapat memenuhi tujuannya jika memenuhi empat karakteristik kualitatif laporan

keuangan yaitu: dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*).

Karakteristik pertama, dapat dipahami yaitu informasi yang disajikan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan, Karakteristik kedua, relevan sangat berarti untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Karakteristik ketiga, keandalan mengandung arti bahwa informasi seharusnya bebas dari kesalahan yang material dan bias, serta dapat menyajikan informasi kepada pengguna secara jujur. Karakteristik keempat dapat dibandingkan, mengandung arti bahwa pemakai laporan dapat membandingkan laporan keuangan antar periode. Namun demikian, perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, laporan keuangan menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. Agar informasi tentang keuangan daerah yang disajikan tidak menyesatkan para pemakainya maka perlu dilakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan daerah tersebut.

Pemeriksaan keuangan daerah dapat dibedakan atas dua yaitu pemeriksaan internal dan pemeriksaan eksternal. Bohari dalam Wahyudi (2009:5) menyatakan bahwa pemeriksaan internal adalah penilaian kegiatan secara bebas didalam suatu organisasi guna menghasilkan jasa pelayanan bagi pelaksanaan fungsi pengendalian manajemen.

Pelaksanaan pemeriksaan keuangan secara internal tentu tidak dapat mengelak dari keharusan memperbandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sungguh-sungguh terjadi. Hal itu dilakukan baik dengan mengacu pada rencana, aturan-aturan, maupun terhadap tujuan yang hendak dicapai. Walaupun demikian kegiatan pengawasan bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan tujuan utamanya adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan, sehingga dapat ditentukan tindakan-tindakan koreksi yang perlu dilakukan dalam rangka memastikan pencapaian tujuan. Bastian (2007) mengemukakan bahwa tujuan dari sebuah pengendalian internal yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yang terdiri atas : (1) keandalan Laporan Keuangan, (2) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan (3) efektivitas dan efisiensi operasi.

Adapun pengawasan secara internal yang dimaksud adalah Inspektorat Daerah. Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah, Inspektorat daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan argumen ini jelas dan nyata bahwa Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal memiliki peran yang sangat strategis, sebagai katalisator dan dinamisator dalam menyukseskan pembangunan daerah. Ia dibutuhkan seorang Kepala Daerah untuk membantunya dalam segala hal yang berkaitan dengan kelancaran jalannya pemerintahan daerah, kesuksesan pembangunan, pembinaan aparatur daerah, dan sebagainya.

Selain dari aspek pengawasan, aspek sumber daya manusia juga harus diperhatikan. Sumber daya manusia merupakan aset utama bagi suatu organisasi atau instansi, mereka berusaha untuk mempertahankan aset utamanya ini, karena mereka menjadi penggerak utama dari suatu organisasi atau perusahaan, kenyataan yang tidak dapat disangkal adalah bahwa karyawan memiliki peran yang berarti bagi perusahaan yaitu melalui keterampilan, pengetahuan, tenaga, serta waktu yang diberikan untuk tercapainya tujuan dari suatu organisasi.

Kelemahan yang paling mendasar pada pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah terletak pada sumber daya manusianya. Kelemahan ini terlihat dari kebijakan yang ditrapkan pemerintah daerah yaitu : rekrutmen calon pegawai negeri sipil dari sarjana akuntansi yang masih kurang dibanding dengan kebutuhan. Pengangkatan pejabat pengelolaan keuangan daerah dan bendahara pada satuan kerja tidak berdasarkan kemampuan, keahlian atau kompetensi sehingga berpengaruh terhadap rendahnya produktivitas yang akan berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

“Tim GTZ-USAID/CLEAN Urban 2001 (dalam Harifan 2009) menyatakan produktivitas sumber daya manusia merupakan suatu pencapaian baik dalam tingkat individu, organisasi atau kelembagaan maupun system untuk melaksanakan fungsi-fungsi akuntansi atau kewenangan demi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien”. Banyaknya pegawai pemerintahan yang tidak memahami tentang SAP dan aturan-aturan pengelolaan keuangan daerah tidak diminimalisasi dengan mengadakan pelatihan-pelatihan mengenai system akuntansi pemerintah daerah yang berkesinambungan. Hal ini ditegaskan oleh Bagir dalam Harifan (2009:20) produktivitas tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh dimana ia ditempatkan dan pelatihan apa yang ia dapatkan.

Penelitian yang dilakukan Harifan (2009) tentang pengaruh produktivitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah juga menyimpulkan bahwa perubahan dalam system pencatatan dalam pengelolaan keuangan daerah harus didukung dengan kemampuan yang memadai mengenai pemahaman terhadap system akuntansi pemerintahan. Namun dari hasil penelitian diketahui bahwa masih banyak pegawai yang memiliki pemahaman rendah terhadap tugas dan fungsinya sehingga produktivitas pegawai menjadi rendah yang berdampak pada keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan daerah.

Namun pada zaman seperti sekarang ini peranan sumber daya manusia tidak akan mencapai titik maksimal apabila tidak diiringi dengan perkembangan teknologi. Semakin bertambahnya waktu, semakin banyak penemuan teknologi terbaru. Kemajuan teknologi tanpa disadari atau tidak, telah memberikan segala

kebaikan dan manfaat bagi kita. Teknologi yang ada dituntut untuk memberikan segala kemudahan kepada para pengguna. Kehadiran teknologi komputer sebagai bagian dari kemajuan teknologi secara global merupakan salah satu sarana dalam pengembangan teknologi yang saat ini kita geluti, yaitu teknologi sistem informasi.

Perusahaan menggunakan sistem informasi akuntansi untuk menghasilkan laporan-laporan khusus agar dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi para *stakeholder*. Menurut Mulyadi (2001:185) salah satu fungsi dari sistem informasi akuntansi antara lain untuk Memastikan bahwa informasi yang dihasilkan dapat diandalkan. Para pemasok piranti lunak (*software*) dapat menyediakan piranti lunak akuntansi yang mengotomatisasikan sebagian besar proses pelaporan. Sebagai hasilnya, setelah informasi yang diperlukan dicatat, laporan-laporan eksternal dapat dihasilkan dengan jauh lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan dengan masa lalu.(Dasaratha, 2008)

Pada lingkungan pemerintah kita mengenal suatu software yang dinamai Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). SIPKD sendiri berfungsi sebagai sistem yang dapat membantu Penyusunan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, dan tentunya sangat membantu dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah mulai dari verifikasi bukti transaksi hingga laporan realisasi anggaran.

Tapi realita yang penulis temukan bahwasanya kualitas laporan keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat tergolong buruk. Pendapat ini ditegaskan oleh

Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPK) yang menempatkan Provinsi Sumatera Barat pada peringkat terburuk dalam audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2009. Dalam LKPD ini, BPK menemukan ketidakwajaran dalam penggunaan anggaran dengan adanya temuan pemeriksaan penyajian akun persediaan sebesar Rp. 44.728.913.289.

Bahkan anggaran belanja modal sebesar Rp. 22.229.872.700 dalam temuan tersebut tidak sesuai dengan penyajian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Bukan itu saja, dalam penyajian akun persediaan yang tidak sesuai SAP tersebut ditemukan pada tujuh instansi SKPD yang ada di Prov Sumbar. Ada pun dinas yang telah ditemukan kejanggalannya oleh BPK RI yaitu, Dinas Koperasi dengan nilai temuan sebesar Rp. 714.806.000,-. Dinas Energi Sumbar Daya Mineral (ESDM) sebesar Rp. 2.418.644.400. Dinas Pertanian sebesar Rp. 411.889.400, di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp. 925.418.000, Dinas Pendidikan sebesar Rp. 36.820.931.889, Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 1.342.916.600. Dinas Kesehatan sebesar Rp. 2.094.307.000. Atas dasar ini BPK menyatakan *disclaimer* (menolak memberikan pendapat) terhadap LKPD Provinsi Sumbar (*bankin news.com /2010*) dan opini wajar dengan pengecualian (WDP) pada periode berikutnya..

Berangkat dari fenomena di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Peran Auditor Internal, Produktivitas Pegawai dan Efisiensi Penggunaan Software Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Barat”**

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yaitu :

1. Apakah Auditor Internal berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah.
2. Apakah Produktivitas Pegawai berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
3. Apakah Efisiensi Penggunaan Software Akuntansi berpengaruh terhadap Laporan Keuangan Daerah.
4. Apakah Auditor Internal, Produktivitas Pegawai, dan Efisiensi Penggunaan Software Akuntansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan Keuaangan Daerah.
5. Sejauh mana masalah/kendala yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam menyusun Laporan Keuangan Dearah.
6. Sejauhmana faktor-faktor lain yang dapat berhubungan dengan kualitas Laporan Keuangan Daerah.

3. Pembatasan masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan di bahas, yaitu pengaruh Peran Auditor Internal, Produktivitas Pegawai dan Efisiensi Penggunaan *Software* Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Sejauhmana Peran Auditor Internal berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah.
2. Sejauhmana Produktivitas Pegawai berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
3. Sejauhmana Efisiensi Penggunaan *Software* Akuntansi berpengaruh terhadap Laporan Keuangan Daerah.

5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi bukti empiris tentang:

1. Pengaruh Peran Auditor Internal terhadap kualitas Laporan Keuangan daerah
2. Pengaruh Produktivitas Pegawai terhadap kualitas Laporan Keuangan daerah
3. Pengaruh Efisiensi Penggunaan *Software* Akuntansi terhadap kualitas Laporan Keuangan daerah

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dan Daerah selama suatu periode. Sedangkan Bastian (2006:247) mendefenisikan laporan keuangan adalah representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas.

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Namun demikian, perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin

dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, laporan keuangan menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No 1 dalam Harahap (2007:121), Tujuan Laporan Keuangan adalah:

1. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai.
3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (2005:56) Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk

menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait.

c. Komponen Laporan Keuangan

Dalam PP No 8 Tahun 2006 laporan keuangan pemerintah pusat/daerah setidaknya-tidaknya terdiri dari:

1. Laporan realisasi anggaran;
Menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya.
2. Neraca;
Menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.
3. Laporan arus kas;
Menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non anggaran yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.
4. Catatan atas laporan keuangan

d. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAP) tahun 2004 dalam Harahap (2003:126), karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi. Informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat di keluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dipahami oleh pemakai tertentu.

2. Relevan

Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi yang memiliki kualitas yang relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi pada masa lalu.

3. Keandalan

Informasi memiliki kualitas yang andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

4. Dapat Dibandingkan

Pemakai laporan harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat dibandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Ketaatan pada standar akuntansi, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan membantu pencapaian daya banding.

Dalam PP Nomor 24 tahun 2005, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ke-empat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan, apakah informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan:

(a) Memiliki manfaat umpan balik (*Feedback Value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

(b) Memiliki manfaat prediktif (*Predictive Value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

(c) Tepat Waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

(d) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi dapat dicegah.

(e) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

(a) Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

(b) Dapat Diverifikasi (*Verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

(c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

2. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang

sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

3. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2. Auditor Internal

Public Accountability hanya dapat terwujud dengan adanya sistem pengawasan yang memadai dari DPRD dan menuntut adanya lembaga audit yang profesional, independen, dan objektif (Halim 2002:9). Menurut Bastian (2007), audit yang dilakukan oleh auditor eksternal pada umumnya bertujuan menilai kewajaran laporan keuangan, sedangkan audit atas penyusunan laporan keuangan oleh pengawas (Auditor Internal) bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian internal dan koreksi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan demi terciptanya keandalan dalam pelaporan keuangan.

Selanjutnya Bastian (2007) mengemukakan bahwa tujuan dari sebuah pengendalian internal yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yang terdiri atas : (1) keandalan Laporan Keuangan, (2) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan (3) efektivitas dan efisiensi operasi.

Menurut Sawyer (2005:10), audit intern adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor intern terhadap operasi dan kontrol

yang berbeda-beda dalam organisasi, untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif. Semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawab secara efektif.

Abdul dalam wahyudi(2009:27) menyatakan bahwa tujuan pelaksanaan pemeriksaan keuangan pada suatu lembaga atau institusi, sangat tergantung pada jenis pemeriksaan keuangan yang dilakukan. Sehubungan dengan itu, ada baiknya bila bila dipahami pula perbedaan antara pemeriksaan keuangan secara internal maupun secara eksternal. Pemeriksaan keuangan secara internal, seperti yang dilakukan oleh Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) dalam lingkungan pemerintahan secara keseluruhan atau inspektorat wilayah (itwil) dalam lingkungan pemerintah daerah, adalah dalam fungsi pengawasan Presiden atau Kepala Daerah.

Pemeriksaan secara eksternal, sebagaimana yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam lingkungan kenegaraan/daerahan, dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat konstitusi untuk memeriksa pertanggungjawaban keuangan pemerintah terhadap DPR dan masyarakat. Sebagai bagian dari pelaksanaan internal fungsi pengawasan pimpinan, pelaksanaan pemeriksaan keuangan secara internal tentu tidak dapat mengelak dari keharusan membandingkan

antara yang seharusnya terjadi dengan yang sungguh-sungguh terjadi. Hal itu dilakukan baik dengan mengacu pada rencana, aturan-aturan, maupun terhadap tujuan yang hendak dicapai. Walaupun demikian kegiatan pengawasan bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan tujuan utamanya adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan, sehingga dapat ditentukan tindakan koreksi yang perlu dilakukan dalam rangka memastikan pencapaian tujuan.

Peran Inspektorat

Sesuai dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwa Inspektorat Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Adapun tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan provinsi. Sedangkan fungsi Inspektorat Provinsi, meliputi :

1. Perencanaan program pengawasan
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Sedangkan Inspektorat kabupaten/kota mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang hampir sama tapi dalam konteks kabupaten/kota masing-masing, yang diatur dan ditetapkan dengan Perda masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 Menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern dilakukan:

a. Melakukan Pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi

Sebagai pengawas intern, Inspektorat Daerah yang bekerja dalam organisasi pemerintah daerah tugas pokoknya antara lain:

1. Pengawasan intern atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2009, indikator kinerja inspektorat sebagai pengawas intern yaitu sebagai berikut:

- a) Dilakukannya pengukuran kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- b) Dikembangkannya sistem informasi evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2. Menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak (Kepala Daerah) telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2009, indikator kinerja inspektorat sebagai pengawas intern yaitu sebagai berikut:

- (1) Dirumuskannya prosedur yang menggambarkan langkah-langkah nyata untuk memenuhi kebijakan dan dibuat tidak bertentangan dengan kebijakan.
- (2) Ditetapkannya kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah

3. Menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2009, indikator kinerja inspektorat sebagai pengawas intern yaitu sebagai berikut:

- (1) Dilaksanakannya SPI atas pengelolaan keuangan daerah oleh SKPD
- (2) Dilaksanakannya transaksi penerimaan, penyetoran dan pembukuan penerimaan pendapatan daerah pada SKPD
- (3) Tersusunnya laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

4. Menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2009, indikator kinerja inspektorat sebagai pengawas intern yaitu sebagai berikut:

- (1) Disediakkannya dana penggunaan anggaran untuk program/ kegiatan telah dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif
 - (2) Adanya perencanaan yang memadai dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif, efisien dan ekonomis
 - (3) Adanya personalia yang dikelola secara efektif dan efisien
5. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai Unit/Satuan Kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi Pemerintah Daerah.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2009, indikator kinerja inspektorat sebagai pengawas intern yaitu sebagai berikut:

- (1) Dilaksanakannya laporan keuangan SKPD yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan serta laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas
- (2) Dilaksanakannya sistem informasi yang tepat, lengkap dan akurat

b. Melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 peran Inspektorat lainnya untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern selain sebagai pengawas intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi juga peran inspektorat yaitu melakukan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, indikator kinerja Inspektorat dalam

melakukan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern, antara lain:

- a. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP
- b. Sosialisasi SPIP
- c. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah No 79 tahun 2005 Inspektorat daerah melakukan tugas sesuai dengan fungsi dan kewenangan melalui;

1. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah
2. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu.
3. Pengujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari unit satuan kerja
4. Pengusutan atas kebenaran lapran mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, koupsi, kolusi, dan nepotisme
5. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa

3. Produktivitas Pegawai

“Tim GTZ-USAID/CLEAN Urban 2001 (dalam Harifan 2009) menyatakan produktivitas sumber daya manusia merupakan suatu pencapaian baik dalam tingkat individu, organisasi atau kelembagaan maupun system

untuk melaksanakan fungsi-fungsi akuntansi atau kewenangan demi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien”.

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Tim GTZ-USAID/CLEAN Urban, 2001 (dalam Harifan 2009), kapasitas sumber daya manusia merupakan kemampuan baik dalam tingkatan individu, organisasi atau kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi akuntansi atau kewenangan untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Menurut Warsoko (2007) kemampuan/*ability* merupakan salah satu unsur penting dalam masalah manajemen dan kepemimpinan, yaitu kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan. Kemampuan berhubungan dengan kecakapan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan, dan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam melaksanakan kinerja/produktivitas tenaga kerja, dalam artian sejauh mana seseorang dapat mencapai hasil yang memuaskan dalam bekerja tergantung dari kecakapan atau kemampuan yang dimiliki. Sedangkan Nitisemito (1996) kemampuan merupakan keterpaduan dari unsur-unsur antara lain: pendidikan, kedisiplinan, bakat, kesehatan dan keselamatan kerja, serta pengalaman kerja. Jadi, pengalaman kerja sangat

berkaitan dengan kemampuan seseorang, atau pengalaman kerja akan meningkatkan kemampuan yang dimiliki..

Menurut standard akuntansi pemerintahan (telaah kritis PP no 24 Th 2005) salah satu penyebab atau kendala sulitnya perlakuan akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yaitu kurang tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten. Menurut Bagir dalam Harifan (2009:20) produktivitas tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh dimana ia ditempatkan dan pelatihan apa yang ia dapatkan.

Penempatan Karyawan

Pada dasarnya bahwa penempatan pegawai berkenaan dengan pengisian jabatan atau promosi yang masih kosong baik sebagai akibat adanya pembentukan unit kerja baru maupun sebagai akibat terjadinya mutasi atau pergantian karyawan. Setiap organisasi harus dapat menempatkan para karyawan pada jabatan atau pekerjaan yang tepat, sesuai dengan ungkapan "*the right man In the right place*".

Penempatan karyawan menurut Siswanto dalam sari (2008) adalah:

suatu proses pemberian tugas dan pekerjaan kepada tenaga kerja yang lulus dalam seleksi untuk dilaksanakan secara kontinuitas dengan wewenang dan ditetapkan serta mampu mempertanggungjawabkan segala resiko dan kemungkinan atas tugas dan pekerjaan, wewenang dan tanggung jawab tersebut. Wewenang dan tanggungjawab diberikan bersifat mutlak, tetapi sebesar porsi dan komposisi yang telah ditetapkan perusahaan.

Lebih lanjut Manulang dalam Butsi (2009:9) menyatakan bahwa “untuk dapat menentukan apakah seseorang itu mampu untuk menggunakan suatu jabatan, perlu diteliti terlebih dahulu mengenai pendidikan, keahlian, pengalaman dan keadaan fisik yang diminta oleh setiap jabatan”. Sedangkan menurut Rivai (2004:210) penempatan adalah penugasan atau penugasan kembali seorang karyawan kepada pekerjaan barunya.

Dari beberapa pengertian penempatan diatas, dapat disimpulkan bahwa penempatan karyawan adalah proses akhir dari seleksi yang menempatkan karyawan pada posisi atau jabatan yang baik untuk karyawan baru maupun karyawan lama.

Faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian dalam menempatkan pegawai sesuai dengan prinsip *the right man in the right place*, saydam (1996:192) antara lain: 1) kesesuaian latar belakang pendidikan pegawai, 2) kondisi kesehatan dan fisik pegawai 3) pengalaman kerja yang dimiliki pegawai, 4) usia pegawai, 5) minat dan keinginan pegawai.

Faktor kesesuaian latar belakang pendidikan yang dimiliki pegawai dengan penempatan pegawai sebagai sumber daya manusia organisasi pada suatu jabatan tertentu memiliki kaitan yang sangat erat. Dasar pendidikan yang telah dimiliki pegawai merupakan dasar pembentukan. Menempatkan seorang pegawai agar dapat meningkatkan kinerja organisasi perlu memperhatikan pengalaman kerja yang dimiliki. Pengalaman kerja ini memungkinkan seseorang pegawai dapat melakukan pekerjaan lebih cepat dari kondisi biasa. Hal ini disebabkan

pegawai telah memiliki pola kerja yang mapan, sehingga menghadapi kondisi yang berulang, pegawai tersebut tidak merasa ragu-ragu untuk melakukannya.

Pelatihan

Jika sistem akuntansi baru dikembangkan dalam perusahaan dan diharapkan dapat dimanfaatkan dengan berhasil, setiap orang yang terkait dengan sistem tersebut harus dibuat sadar dengan tanggung jawab masing-masing terhadap pelaksanaan bagian sistem yang menjadi tanggung jawabnya dan tentang apa yang dapat dimanfaatkan dari sistem tersebut bagi pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu dalam tahap pengembangan sumberdaya manusia dapat dilakukan melalui pelatihan karyawan yang terkait dalam pelaksanaan sistem akuntansi

Pelatihan membantu dalam mengembangkan keahlian kepemimpinan, memotivasi, kesetiaan, sikap yang lebih baik, dan aspek-aspek lainnya yang dapat menunjukkan keberhasilan karyawan dan menejer. Pelatihan adalah proses yang sistematis mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat ini. Pelatihan memiliki orientasi saat ini dan membantu pegawai untuk mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya (veithzal, 2005;190).

Pada dasarnya setiap kegiatan yang terarah tentu harus mempunyai sasaran yang jelas, memuat hasil yang ingin dicapai hendaknya dirumuskan dengan jelas agar langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan pelatihan dapat diarahkan untuk mencapai sasaran yang dituju. Sasaran pelatihan yang dapat

dirumuskan dengan jelas akan dijadikan sebagai acuan penting dalam menentukan materi yang akan diberikan, cara dan sarana yang diperlukan.

Jika karyawan tidak diberi pelatihan dengan baik, perusahaan tidak akan memetik manfaat sistem bersangkutan secara optimal. Dampaknya adalah bahwa investasi yang dilakukan perusahaan tidak akan memberikan hasil yang baik

Menurut Veitzal (2005:225) untuk mencapai program pelatihan yang harus diperhatikan adalah:

- a) Mempunyai sasaran yang jelas dan memakai tolak ukur terhadap hasil yang dicapai.
- b) Diberikan oleh tenaga pengajar yang mampu menyampaikan ilmunya serta mampu memotivasi peserta pelatihan
- c) Materi disampaikan secara mendalam sehingga mampu merubah sikap dan meningkatkan prestasi karyawan.
- d) Menggunakan metode-metode yang tepat guna, misalnya diskusi untuk satu sasaran tertentu.
- e) Materi sesuai dengan latar belakang teknis, permasalahan dan daya tangkap peserta.
- f) Disertai dengan metode penilaian sejauh mana sasaran program pelatihan dapat dicapai.

Adapun manfaat pelatihan menurut Werther dan Darvis, 1996 dalam Fetri, 2009 antara lain :

- a) *Improves the job knowledge and skill at all level of the organization* (memperbaiki pengetahuan keterampilan kerja pada semua tingkatan pada sebuah organisasi)

Pelatihan dapat memperbaiki pengetahuan dan keahlian kerja karyawan pada semua level dan tingkatan didalam sebuah organisasi karna pengetahuan dan keahlian karyawan meningkat, pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga dapat menekan biaya dan meningkatkan profitabilitas perusahaan

- b) *Improves the morale of the work force* (memperbaiki semangat kerja karyawan)

Pelatihan dapat memperbaiki semangat kerja karyawan, mengurangi konflik, meningkatkan kebersamaan, menciptakan hubungan atasan dan bawahan yang harmonis serta membantu mengembangkan sikap tanggung jawab kepada perusahaan. Lingkungan kerja yang hangat dan harmonis membantu karyawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya

Aid in developing leadership skill, motivation, loyalty, better attitudes and other aspect that successful workers and manager usually display (menolong, pembentukan kemampuan kepemimpinan, motivasi, loyalitas, perilaku yang baik, dan beberapa aspek yang diperlihatkan para pekerja dan manajer yang sukses)

- c) *Aid in increasing productivity and or quality of work* (menolong dalam peningkatan produktivitas dan kualitas kerja)
- d) *Helps employee adjust to change* (menolong karyawan untuk berubah)

- e) *Helps the individual in making better decisions and effective problem solving* (menolong individu untuk membuat keputusan dan pemecahan secara lebih baik)
- f) *Helps create a better corporate image* (menolong menciptakan citra perusahaan menjadi lebih baik)

4. Efisiensi Penggunaan *Software* Akuntansi

Software atau perangkat lunak merupakan sekumpulan perintah yang dijalankan oleh komputer. Program komputer ini terdiri dari susunan logika untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu di komputer. Perangkat lunak ini melibatkan berbagai komponen dalam komputer, seperti sistem operasi, program dan data yang yang disimpan atau dibaca

Perusahaan menggunakan sistem informasi akuntansi untuk menghasilkan *laporan*-laporan khusus agar dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi para *stakeholder*. Para pemasok piranti lunak (*software*) dapat menyediakan piranti lunak akuntansi yang mengotomatisasikan sebagian besar proses pelaporan. Sebagai hasilnya, setelah informasi yang diperlukan dicatat, laporan-laporan eksternal dapat dihasilkan dengan jauh lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan dengan masa lalu.(Dasaratha, 2008)

Dalam dunia akuntansi kita dapat menjumpai bermacam-macam jenis *software* seperti MYOB, ZAHIR, FINA, dan lainnya yang tentu dapat dengan mudah kita dapatkan. Namun berbeda dengan sektor bisnis, pada akuntansi

sektor publik kita mengenal apa yang disebut SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah).

SIPKD

SIPKD sendiri merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektifitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. SIPKD juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi Departemen Dalam Negeri terhadap pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan berbagai peraturan perundang-undangan dalam bentuk sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

a. Ruang Lingkup Aplikasi

Aplikasi Valid49, yaitu aplikasi yang dapat digunakan sebagai alat Bantu dalam proses-proses yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah baik pada tingkat SKPD maupun SKPKD, antara lain penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan penusunan anggaran perubahan.

Hubungan aplikasi tingkat SKPD dan SKPKD dapat dihubungkan secara *On line* maupun *Off line* tergantung kesediaan infrastruktur yang ada. Tetapi apabila *Off line* dalam proses penyusunan anggaran dan perubahan anggaran data antara SKPD dan SKPKD dapat dilakukan penggabungan data untuk kepentingan konsolidasi.

b. Fungsi dan Output Modul-modul

1) Modul *Utility*

Modul utility adalah modul penunjang bagi 3 modul utama dalam beberapa hal terkait pengoperasian aplikasi secara umum. Modul Utility ini berfungsi sebagai Konfigurasi Nama Pemerintah Daerah yang menjadi pemilik/ pengguna aplikasi, Daftar dan Hak akses para pengguna/operator yang terlibat dalam pengoperasian aplikasi, Proses *Backup* dan *Restore database* aplikasi

2) Modul Data Master

Selain Modul Utility, Modul Data Master juga termasuk modul penunjang bagi 3 Modul Utama dalam beberapa hal terkait pengoperasian aplikasi. Tetapi dalam modul ini, keterkaitan data-data yang dihasilkan dari menu-menu pada modul data master ini. Adapun fungsi modul data master adalah sebagai berikut :

- a) Setting peridisasi anggaran
- b) Setting tapan anggaran
- c) Setting organisasi, Program dan kegiatan SKPD
- d) Setting rekening APBD, Neraca dan Rekening koran
- e) Daftar pegawai, Bendahara dan Atasan langsung
- f) Setting penandatanganan dokumen
- g) Modul ini juga menghasilkan dokumen antara lain :
 - (1) Daftar urusan dan organisasi
 - (2) Daftar program dan kegiatan

(3) Daftar rekening belanja

3) Modul Anggaran

Modul anggaran adalah aplikasi yang disiapkan untuk membantu proses penyusunan dokumen-dokumen anggaran yang terdiri dari Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), APBD beserta ringkasan dan penjabarannya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Surat Penyediaan Dana (SPD), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P), APBD-Perubahan beserta ringkasan dan penjabarannya.

4) Modul Kas

Modul kas adalah alat bantu aplikasi guna mendukung proses pelaksanaan APBD, terkait penerbitan dan pencatatan dokumen-dokumen sebagai berikut Tanda Bukti Pembayaran (TBP), Bukti Pengeluaran Kas, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Permintaan Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD), Daftar Penguji (DP), Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Surat Tanda Setoran (STS), Daftar Penguji (DP), Buku Kas Umum (BKU), Kartu Kendali Belanja Tak Langsung, Kartu Kendali Kegiatan

5) Modul Pembukuan

Modul Pembukuan adalah alat bantu aplikasi guna mendukung proses pelaksanaan Akuntansi Daerah, yang terdiri dari Jurnal-jurnal yaitu

Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, SPJ, Transfer Kas, Korolari, Memorial dan Buku Besar Pendapatan, Buku Besar Belanja, Buku Besar Pembiayaan, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca serta Laporan Arus Kas.

6) Modul Manajemen

Modul manajemen adalah modul pelengkap yang disediakan oleh aplikasi guna membantu para pemimpin dalam mendapatkan informasi/laporan “terkini” tentang proses pengelolaan keuangan daerah mulai proses anggaran hingga pertanggungjawaban. Modul ini menampilkan seluruh menú laporan yang menjadi output dari Modul Utama.

Hubungan Antar Modul

Perlu diketahui bahwa ke 6 (enam) modul tersebut saling terkait satu sama lainnya. Keterkaitan modul-modul tersebut dihubungkan pada beberapa modul tertentu di beberapa menunya. *Modul utility* dan *modul data master* dikatakan sebagai modul penunjang, hal ini dikarenakan kedua modul tersebut secara struktur data dan aliran menú menunjang terhadap kebutuhan modul utama atau dengan kata lain akan terdapat permasalahan dalam prosesnya jika data pada *modul data master* dan *utility* tidak dilaksanakan terlebih dahulu.

Menurut Mulyadi (2001:185) fungsi dari system informasi akuntansi antara lain untuk mencapai tiga tujuan dasar berikut :

1. Memastikan bahwa informasi yang dihasilkan dapat diandalkan.
2. Memastikan bahwa aktivitas organisasi dilaksanakan dengan efisien dan sesuai dengan tujuan, serta tidak melanggar kebijaksanaan pemerintahan yang berlaku.
3. Menjaga asset-aset organisasi

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwasannya peranan sistem informasi akuntansi yang efektif dan tepat guna akan mempengaruhi hasil akhir dalam pembuatan suatu laporan keuangan.

Suatu sistem informasi akuntansi dianggap efektif, jika bisa memenuhi kebutuhan yang menjadi tujuan pengembangan sistem itu sendiri. Menurut Nugroho (2001:518) ada beberapa kriteria sistem yang dapat dikatakan efektif jika:

- 1) Sistem informasi dapat menghasilkan informasi yang cermat dan tepat waktu.
- 2) Sistem informasi dapat menghasilkan informasi yang bebas dari kesalahan, kecurangan dan dapat teruji.
- 3) Sistem informasi dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.
- 4) Sistem informasi yang bisa memenuhi kebutuhan organisasi dan dapat memberikan kepuasan bagi pemakainya.

- 5) Penerapan sistem informasi memerlukan banyak dana dan waktu sehingga sistem yang dihasilkan harus dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang
- 6) Sistem informasi dapat dipandang dari situasi lingkungan dan persaingan yang ada
- 7) Penerapan sistem informasi dapat diterima oleh semua pihak dalam perusahaan.

B. Penelitian Relevan

Dalam penelitian relevan ini penulis belum banyak memasukkan hasil yang masih terkait dengan penelitian yang menghubungkan antara peran Auditor internal, Produktivitas Pegawai dan Efisiensi penggunaan *software* akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dikarenakan masih adanya keterbatasan dari sumber dan referensi. Namun diantaranya dapat digunakan adalah penelitian yang dilakukan oleh Fardyan (2010) melakukan penelitian yang menguji pengaruh Komitmen Pimpinan dan Kualitas SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam penelitian Fardyan, populasi atau responden yang digunakan yaitu staf akuntansi SKPD dilingkungan pemerintah daerah kota Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan komitmen pimpinan dan kualitas SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Padang, baik secara parsial maupun simultan.

Harifan (2009) meneliti mengenai mengenai pengaruh produktivitas sumber daya manusia, teknologi informasi, dan pengendalian akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa produktivitas sumberdaya manusia mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Sejalan dengan penelitian diatas, penelitian Satria (2010) yang menguji pengaruh peran inspektorat daerah dan pelaksanaan SPI terhadap terwujudnya akuntabilitas publik. Dalam penelitian Satria populasi atau responden yang digunakan yaitu staf keuangan SKPD kota Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan peran Inspektorat Daerah terhadap terwujudnya Akuntabilitas publik.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada menunjukkan masih lemahnya kualitas laporan keuangan dari pemerintah, karena peranan auditor, kompetensi pegawai dan penggunaan software akuntansi yang kurang baik dalam penyusunan laporan keuangan.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi keterikatan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Keterikatan maupun variabel yang diteliti diuraikan dengan berpijak pada kajian teori diatas. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan di atas dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, penerapan auditor internal haruslah baik, Produktivitas sumber daya manusia yang tinggi dan penerapan teknologi *software* akuntansi yang tepat di pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Kualitas laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh suatu entitas pelaporan. Suatu laporan keuangan itu berkualitas dan bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Selain itu dalam menghasilkan laporan yang berkualitas dengan baik maka perlu juga dipertimbangkan suatu asumsi bahwa pelaporan yang baik terwujud dari SDM yang baik serta pemanfaatan teknologi yang tepat guna.

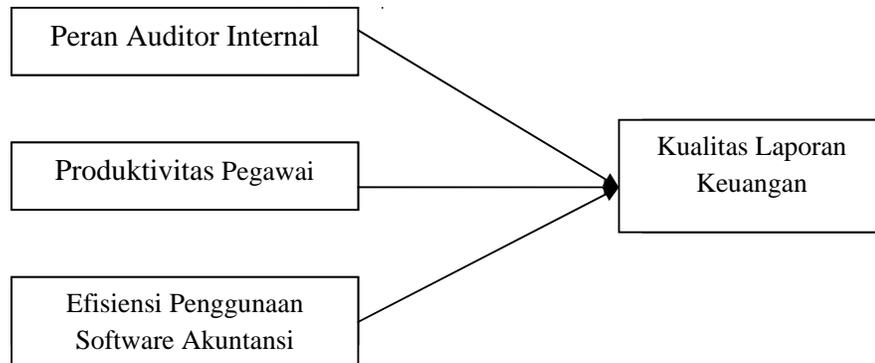
Dalam peningkatan kualitas laporan keuangan dapat diwujudkan dengan pengawasan dari auditor internal sehingga operasional pemerintahan yang baik akan tercapai. Auditor internal sangat menentukan terhadap baik atau tidaknya kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini dapat tercapai jika auditor internal yang dalam hal ini adalah inspektorat daerah mampu melaksanakan fungsinya dengan baik. Peran dari Auditor internal yang dalam hal ini dilakukan oleh inspektorat daerah adalah melakukan 1) Perencanaan program pengawasan 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan 3) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Prioritas utama dalam peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah adalah faktor produktivitas SDM. Seperti yang telah disinggung sebelumnya faktor produktivitas SDM (pegawai) sangat mempengaruhi atas kualitas laporan keuangan karena pegawai adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas pembuatan handal atau tidaknya laporan keuangan tersebut. Produktivitas

Pegawai yang tinggi otomatis akan membangun lembaga yang kuat dan budaya yang sehat atau bersih. Sumber daya manusia yang memiliki produktivitas tinggi dapat membuat efektifitas pelaksanaan akuntansi akan bertambah bila sumber daya manusia tersebut mengetahui prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan dalam SAP. Sehingga semakin tinggi produktifitas pegawai tersebut maka akan semakin berkualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Seiring dengan perubahan waktu, perkembangan teknologi didunia semakin pesat. Hal ini juga berdampak pada sektor akuntansi, ini ditandai dengan semakin banyak diciptakannya *software-software* akuntansi demi kesempurnaan proses akuntansi, sehingga menghasilkan produk berupa laporan keuangan yang handal dan relevan.

Dalam penilaian resiko untuk pelaporan keuangan adalah tindakan manajemen yang mengidentifikasi dan menganalisis resiko-resiko yang relevan dalam penyusunan laporan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Sedangkan dalam informasi dan komunikasi harus disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu yang diselenggarakan secara efektif sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya. Jadi semakin baik pengawasan dari auditor internal, kredibilitas pegawai yang tinggi serta penggunaan teknologi *software* yang tepat guna maka akan berdampak positif pada kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dapat dilakukan hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : Peran Auditor internal berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang.
- H₂ : Produktivitas Pegawai berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Provinsi Sumatra Barat.
- H₃ : Efisiensi Penggunaan *software* akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Padang

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Pengaruh peran Auditor Internal, Produktivitas Pegawai dan Efisiensi Penggunaan Software Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat” ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Auditor Internal berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Produktivitas Pegawai berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Efisiensi Penggunaan Software Akuntansi berpengaruh signifikan positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

B. Keterbatasan dan Saran Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu direvisi penelitian selanjutnya, antara lain:

Dalam penelitian ini masih ada beberapa SKPD yang menolak untuk mengisi kuesioner sehingga jumlah data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan jumlah sampel yang diinginkan. Selain itu item pernyataan pada kuesioner yang diberikan, tidak semuanya bisa dipahami oleh responden. Berdasarkan keterbatasan yang melekat pada penelitian ini, maka saran dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan metode pengumpulan data dengan cara survey lapangan dan wawancara untuk mengetahui sejauh mana hubungan antar variable.
2. Bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti judul yang sama, maka peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan dan menggunakan variable lain seperti komitmen pimpinan.
3. Bagi SKPD Provinsi Sumatera Barat diharapkan lebih meningkatkan pelatihan yang diberikan kepada pegawai serta menciptakan organisasi yang lebih terbuka terhadap perubahan dan inovasi.